

***Factors Influencing the Implementation of Government Credit
Cards: Competence of Human Resources
as a Moderating Variable***

By Rahmat Taufik

Abstract

The Government Credit Card (KKP) is a payment instrument using a card that can be used to make payments for expenditures that can be charged to the State Budget, where the cardholder's payment obligations are met in advance by the government credit card issuing bank, and the work unit is obliged to pay off payment obligations on time agreed with the payment at once. However, from the start, the adoption of government policies related to non-cash payment systems using KKP has not been optimal. This research is centered on one of the Ministries/Institutions in Indonesia, namely the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology (Kemendikbudristek) in which there are 143 work units that use KKP in their financial processes. This research tries to bridge these policies' lack of optimal implementation by examining the factors that influence user intention to use KKP within the Kemendikbudristek. The purpose of this study is to test the influence of perceived usefulness, perceived ease of use, and facilitating conditions with human resource competence as a moderating variable. The sample in this study was 411 civil servants within Kemendikbudristek who had positions as PPK, BP, and BPP. The data was obtained from the results of the analysis using the Structural Equation Model (SEM) PLS version 3.0. The results showed that perceived usefulness, perceived ease of use, and facilitating conditions significantly influenced the intention to use KKP. As for the moderating variable, human resource competence, it can only moderate the variable perceived ease of use on intention to use KKP.

Keywords: *Intention to use KKP, perceived usefulness, perceived ease of use, facilitating conditions, competence of human resources*

**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengimplementasian Kartu
Kredit Pemerintah: Kompetensi SDM
sebagai Variabel Pemoderasi**

Oleh Rahmat Taufik

Abstrak

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) merupakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah, dan satker berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus. Namun dari awal penerapannya masih belum optimal adopsi dari kebijakan pemerintah terkait dengan sistem pembayaran nontunai dengan menggunakan KKP. Penelitian ini berpusat pada salah satu Kementerian/Lembaga yang ada di Indonesia, yaitu Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang didalamnya terdapat 143 satuan kerja yang menggunakan KKP dalam proses keuangannya. Penelitian ini mencoba untuk menjembatani kurang optimalnya penerapan kebijakan tersebut dengan memeriksa faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna dalam menggunakan KKP di lingkungan Kemendikbudristek. Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan kondisi yang memfasilitasi dengan kompetensi SDM sebagai variabel pemoderasi. Sampel dalam penelitian ini adalah 411 ASN di lingkungan Kemendikbudristek yang memiliki jabatan sebagai PPK, BP, dan BPP. Data yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan *Structural Equation Model* (SEM) PLS versi 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi manfaat, persepsi kemudahan, dan kondisi yang memfasilitasi signifikan mempengaruhi niat dalam menggunakan KKP. Sedangkan untuk variabel pemoderasi yaitu kompetensi SDM hanya dapat memoderasi variabel persepsi kemudahan terhadap niat untuk menggunakan KKP.

Kata Kunci: *Intention to Use* KKP, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, kondisi yang memfasilitasi, dan kompetensi SDM